

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI RIAU DALAM  
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA  
MENURUT POLITIK ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik guna memperoleh  
gelar sarjana syari'ah*



**OLEH**

**RANI ELINA**

**NIM 10824004355**

**PROGRAM S1  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2013**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dengan judul **“STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA MENURUT POLITIK ISLAM”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak, bantuan moril dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada Ayahanda Elizar dan Ibunda Novriyenni tercinta yang telah mencurahkan segala daya, upaya, kasih sayang serta do'a yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan penulis, semoga curahan dan kasih sayang mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.
2. Yang terhormat Rektor UIN Suska Riau Prof.Dr.H.Muhammad Nazir beserta jajaran yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu d Universitas ini.
3. Buat adikku tercinta Rindi antika terimakasih buat dorongan serta doanya. Teruslah berusaha dan berdoa untuk menggapai cita-citamu sehingga membuat ayahanda dan ibunda bangga melihat kesuksesan kita.

4. Bapak Syafrinaldi, SH, M.A selaku pembimbing yang telah berperan aktif dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan, koreksi dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan dorongan semangat dan ilmu-ilmu sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta staf tata usaha yang telah memberikan surat izin kepada penulis.
7. Bapak Ketua Jurusan H. Ismardi M.A dan Sekertaris Jurusan Bambang Hermanto M.A yang telah memberikan dorongan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
8. Bapak kepala BNNP Riau Drs.Bambang Setiawan dan pegawai kantor BNNP Provinsi Riau yang telah banyak membantu penulis dalam melengkapi data-data sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan.
9. Buat abang penulis Edriyanto, Amd dan Doris Novendra, ST yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis.
10. Buat teman-teman seperjuanganku Jinayah Siyasah angkatan 2008 yaitu Sri Milani (comeng), Vhia, kak Tuti, Dedi, Dede, Arifin, Salim, Amrun, Subli, Maruli, Budi, Alm. Erick, Ahmad, Mamad, dan Amran terimakasih teman-teman atas bantuannya dan kebersamaannya.

11. Buat yang tercinta Yogi andika (Uugie knok knok) , terimakasih atas dorongan dan pengorbanannya yang begitu besar dalam membantu penulis membuat skripsi ini, serta kasih sayang dan cinta yang beliau berikan selama 2 tahun ini.
12. Buat teman kos Niefa,, Kiki Okatvina, Khasbi Maimunnah, Iis Susanti, Delsi Sofiana Dewi, Eli, Chicha dan Nita yang telah memberikan semangat dan do'anya buat penulis.
13. Buat rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi bapak, Ibu, dan Saudara-Saudari sekalian.

Semoga bimbingan dan petunjuknya menjadi amal dan ibadah disisi AllahSWT. Penulis mengharapkan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Dan harapan penulis semoga laporan ini berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 5 februari2013

Penulis

**RANI ELINA**



## **ABSTRAK**

### **STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA MENURUT POLITIK ISLAM**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menimbulkan banyak korban dan banyak masalah sosial lainnya didunia. Letak provinsi Riau yang strategis menjadikan Riau sebagai daerah yang rawan terhadap aksi penyelundupan narkoba, BNN Provinsi Riau dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar Riau terbebas dari masalah narkoba. Dengan diterbitkannya Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN tahun 2011-201 diinstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk menyelenggarakan P4GN. Rencana aksinya adalah memberikan penyuluhan dan penerangan kepada siswa/pelajar pendidikan menengah yang rentan dan berisiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti narkoba di kalangan para siswa/pelajar pendidikan menengah yang lingkungannya rentan dan berisiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di sekretariat BNN Provinsi Riau. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BNNP dalam menanggulangi masalah narkoba dikalangan remaja, dan untuk mengetahui tinjauan politik Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNP Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subyek penelitian ini adalah pegawai di sekretariat Badan Narkotika Provinsi Riau, dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Strategi Badan Narkotika Provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja jika ditinjau dari politik islam. Populasi dalam penelitian ini pegawai di Sekretariat BNN Provinsi Riau dengan menggunakan total sampling teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Melalui wawancara, dan observasi di lapangan dengan responden, di peroleh jawaban-jawaban bahwa memang telah banyak upaya yang dilakukan BNN Riau, namun ada berbagai permasalahan yang timbul, baik internal maupun eksternal, sehingga strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau kurang berjalan.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa starategi yang dilakukan BNNP Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja memang belum maksimal.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dengan judul **“STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA MENURUT POLITIK ISLAM”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak, bantuan moril dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada Ayahanda Elizar dan Ibunda Novriyenni tercinta yang telah mencurahkan segala daya, upaya, kasih sayang serta do'a yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan penulis, semoga curahan dan kasih sayang mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.
2. Yang terhormat Rektor UIN Suska Riau Prof.DR.H.Muhammad Nazir beserta jajaran yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Buat adikku tercinta Rindi antika terimakasih buat dorongan serta doanya. Teruslah berusaha dan berdoa untuk menggapai cita-citamu sehingga membuat ayahanda dan ibunda bangga melihat kesuksesan kita.

4. Bapak Syafrinaldi, SH, M.Aselaku pembimbing yang telah berperan aktif dalam memberikan pengarahannya, bimbingan dan bantuan, koreksi dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan dorongan semangat dan ilmu-ilmu sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta staf Tata Usaha yang telah memberikan surat izin kepada penulis.
7. Bapak Ketua Jurusan H. Ismardi M.A dan Sekretaris Jurusan Bambang Hermanto M.A yang telah memberikan dorongan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
8. Bapak kepala BNNP Riau Drs.Bambang Setiawan dan pegawai kantor BNNP Provinsi Riau yang telah banyak membantu penulis dalam melengkapi data-data sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan.
9. Buat abang penulis Edriyanto, Amd dan Doris Novendra, ST yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis.
10. Buat yang tercinta Yogi andika (Ugie knok knok) , terimakasih atas dorongan dan pengorbanannya yang begitu besar dalam membantu penulis membuat skripsi ini, serta kasih sayang dan cinta yang beliau berikan selama 2 tahun ini.
11. Buat teman-teman seperjuanganku Jinayah Siyasah angkatan 2008 yaitu Sri Milani (comeng), Vhia, kak Tuti, Dedi, Dede, Arifin, Salim, Amrun, Subli, Maruli, Budi, Al



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I     PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Dan Manfaat .....	5
E. MetodePenelitian.....	6
F. Sistematika penulisan.....	8

### **BAB II     TINJAUAN UMUM BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNN) RIAU**

A. Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau .....	9
B. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau .....	10
C. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau .....	11
D. Fungsi BNN Provinsi Riau.....	12
E. Program BNN Provinsi Riau.....	13

### **BAB III     TINJAUAN TEORITIS TENTANG NARKOBA**

A. Pengertian Politik dan Strategi.....	15
B. Narkoba dab Jenisnya .....	17
C. Dasar Hukum Narkoba.....	22
D. Strategi Pencegahan Narkoba Menurut Politik Islam .....	25

**BAB IV    TINJAUAN TERHADAP STRATEGI BNN  
PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

A. Strategi BNN Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja .....	32
B. Tinjauan Politik Islam Terhadap Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau .....	43

**BAB V    PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Jumlah Kasus Narkoba Yang Terungkap Tahun 2010 di Provinsi Riau .....	41
Tabel 4.2	Jumlah Kasus Narkoba yang Terungkap Tahun 2011 Di Provinsi Riau .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Terutama pada remaja-remaja saat ini yang makin dekat dengan narkoba. Karena posisi Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika.<sup>1</sup>

Narkoba selain bermanfaat dalam penggunaannya terutama untuk dunia kedokteran, penelitian ilmu pengetahuan dan sebagainya. Namun yang sangat terpenting adalah bahayanya apabila disalahgunakan akan menyebabkan kematian. Bahayanya tidak memandang siapa dia, dari mana, apa jabatannya, dan dari mana keturunannya, kalau dia sudah menggunakan narkoba ia akan menjadi lemah fisik maupun mentalnya.

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela.

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Paparan Hukum dan Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 1984), cet. ke 2, h. 185.

Pada tahun 2003 PBB menempatkan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya di kalangan pemuda sebagai salah satu dari sepuluh isu global sangat perlu mendapat perhatian diberbagai Negara-negara.<sup>2</sup>

Di Indonesia, jumlah anak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba makin meningkat. Pada tahun 2006, angka pengguna narkoba nasional di Indonesia mencapai 3,2 juta orang dan 32% dari pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa.<sup>3</sup> Angka-angka tersebut sangat memprihatinkan kita semua. Program dukungan pemerintah, pendidikan kepada orang tua untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat ditunda lagi

Letak Propinsi Riau yang strategis menjadikan Riau sebagai daerah yang rawan terhadap aksi penyelundupan narkoba. BNN/BNK dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar Riau terbebas dari masalah narkoba. Berdasarkan data dan hasil rapat koordinasi BNN Provinsi Riau pada Desember 2008 lalu, ternyata Provinsi Riau merupakan rangking ke-5 terbesar kasus narkoba, setelah Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Utara.

Melihat permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa, atau remaja Riau yang sangat mengkhawatirkan tersebut, selayaknya kita punya rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan masa depan mereka dan seluruh lapisan masyarakat perlu bahu membahu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini, jika tidak, akan terjadi *the lost*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

*generation* (Generasi Yang Hilang) dan visi BNN “Terwujudnya Masyarakat Indonesia Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2015 tidak pernah terwujud.<sup>4</sup>

BNP (Badan Narkotika Propinsi) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang ada di tingkat provinsi punya tugas besar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan sangat dibutuhkan strategi yang jitu untuk mencegah secara dini agar para remaja tidak sampai menyalahgunakan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

Dalam proses pencegahan narkoba di Provinsi Riau sendiri, menurut observasi penulis sudah banyak yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau, hal ini terbukti dengan bentuk usaha-usaha yang telah dilakukan, yakni berupa:

1. Membuat plang, spanduk, pamflet, brosur yang berisi ajakan agar jangan pernah mencoba narkoba kalau tidak ingin mati sia-sia.
2. Melaksanakan seminar-seminar untuk mensosialisasikan bahaya narkoba.
3. Menjalin kerja sama dengan media massa dan elektronik.
4. Membentuk group (kelompok-kelompok sebaya) yang anti narkoba.

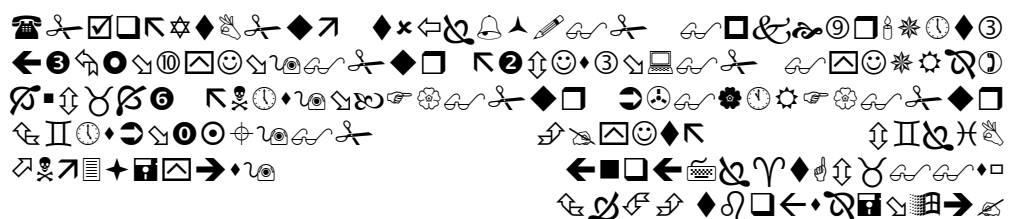
Indonesia adalah Negara yang mengakui keberagaman agama, tiap agama selalu mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk menjalankan ajaran agama tersebut tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia baik jasmani maupun rohaninya dari segala hal yang dapat membahayakan dan merusak diri. Dalam Islam penggunaan narkoba pada dasarnya boleh dipakai terutama oleh dokter dalam kepentingan medis, karena tidak akan

---

<sup>4</sup> BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia), *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, (Jakarta Timur; 2007), cet. ke 1, h. 65

menimbulkan kemudharatan bagi pasien yang diobati bahkan akan memberikan kesembuhan.<sup>5</sup>

Kenyataannya di lapangan, banyak para remaja, orang tua, mahasiswa, bahkan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan penggunaan narkoba, Sumber Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menyebutkan, pada tahun 2009 lalu terdapat sebanyak 102 kasus penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja dan putaw serta psykotropika jenis ekstasi dan sabu-sabu dengan jumlah tersangka sebanyak 137 orang. Sedangkan pada tahun 2010 hingga Desember, sebanyak 111 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 151 orang. untuk itu agama Islam sangat melarang keras perbuatan tersebut bahkan mengharamkannya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90 :



Artinya:

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2008), cet. ke 1, h. 48

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media 2004), cet.ke 2, h. 130

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul: **”STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA MENURUT POLITIK ISLAM”**.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terfokus penelitian ini, maka perlu ditegaskan batasan dalam penelitian ini, adapun yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah penulis hanya meneliti strategi BNN Provinsi Riau pada periode 2010/2011.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa strategi BNN Provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana tinjauan Politik Islam terhadap strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui strategi BNN Provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap remaja.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan politik islam terhadap BNN Provinsi Riau.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Sebagai syarat menyelesaikan studi penulis di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.



- b. Semoga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Fiqih Siyasah.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu jenis penelitian dimana penulis terjun langsung ke lapangan dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data-data yang sesuai untuk menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, JL. Pepaya No. 65, Pekanbaru, Riau.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala dan seluruh pegawai Badan Narkotika Provinsi Riau, sedangkan yang menjadi objeknya adalah strategi badan narkotika provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja.

### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dan pegawai BNN Provinsi Riau dengan jumlah populasi sebanyak 20 orang. Penulis menggunakan teknik total sampling.

## 5. Sumber Data

- a. Data primer, sebagai data primer dalam penelitian ini adalah langsung dari pegawai sekretariat/pekerja di kantor Badan Narkotika Provinsi tersebut dan para remaja di pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi, dan internet.

## 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengambil pendapat, dan informasi dari responden dengan mengadakan wawancara langsung.
- b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip penting yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian.

## 7. Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya memberikan penganalisaan data yang telah ada. Data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata.

## 8. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan pengumpulan fakta-fakta secara menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisanya.

- c. Deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

**BAB I.** Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

**BAB II.** Tinjauan umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau yang berisikan sejarah berdirinya BNN provinsi Riau, struktur organisasi, visi dan misi, dan tugas, serta fungsi BNN Provinsi Riau

**BAB III.** Tinjauan teoritis tentang narkoba yang berisikan sejarah islam tentang pengertian narkoba dan jenis-jenisnya, pengharamann khamar, qiyas antara khamar dan narkoba, strategi BNN menurut politik Islam.

**BAB IV.** Tinjauan Politik Islam yang berisikan Program dan strategi BNN Provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Tinjauan politik Islam tentang Strategi BNN Provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

**BAB V.** Kesimpulan dan saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNN) RIAU**

#### **A. Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau**

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971. Pada masa itu permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan masalah kecil dan pemerintahan orde baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Ini membuat legah pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia terhadap ancaman bahaya narkoba sehingga saat permasalahan narkoba ini meledak dengan diiringi krisis mata uang pada pertengahan tahun 1997, Pemerintah seakan belum siap untuk menghadapinya.

Menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang narkoba. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN dirasakan tidak memadai untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin serius. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional, sehingga BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tugas pokoknya adalah mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan dan P4GN serta melaksanakan P4GN dengan membentuk SATGAS yang bersifat operasional.<sup>1</sup>

Kewenangan BNN sebagai lembaga pemberantasan Narkotika memiliki kewenangan dalam penyidikan sebagaimana UU 35 Tahun 2009, penyidik BNN dalam pasal 75 berwenang dalam:

- a. Mengajukan perkara, tersangka, dan barang bukti termasuk harta yang disita kepada jaksa penuntut umum (JPU).
- b. Memerintahkan Bank/Lembaga keuangan untuk memblokir rekening.
- c. Memiliki akses Bank/ Lembaga keuangan tentang keuangan tersangka.
- d. Memiliki akses ke PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan).

## **B. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau**

### **1. Visi BNN Riau**

Terwujudnya masyarakat Riau bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2015 guna meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka mewujudkan kesajahteraan provinsi Riau.

---

<sup>1</sup>Bambang Setiawan, (Ketua BNN), *wawancara*, Pekanbaru, 13 Oktober 2013

## 2. Misi BNN Riau

- a. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan secara terpadu dan lintas bidang/sektor
- b. Menegakkan supremasi hukum yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
- c. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi secara terpadu
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada dimasyarakat<sup>2</sup>

### C. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau

Berdasarkan Pergub Nomor 23 Tahun 2008 BNN mempunyai tugas membantu gubernur dalam hal :

1. Mengkoordinasi perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan kebijaksn operasional BNN di bidang ketersediaan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).

---

<sup>2</sup> Bambang Setiawan, Kepala BNNP Riau, *wawancara*, Pekanbaru, 3 Desember 2012

2. Membentuk satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

#### **D. Fungsi BNN Provinsi Riau**

Berdasarkan Pergub Nomor 23 Tahun 2008, dalam melaksanakan tugasnya BNN menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang ketersediaan P4GN.
2. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah provinsi di bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
4. Pembangunan dan pengembangan sistem informatika sesuai dengan kebijakan operasional BNN

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kinerja BNNP yaitu:

- a. Tidak cukupnya atau kurangnya jaringan atau organisasi informen-informen guna membantu tugas BNNP dalam mengantisipasi dan mencegah narkoba.
- b. Keterbatasan personil BNNP

- c. Kurangnya profesionalisme dalam kinerja BNNP
- d. Minim dan kurangnya fasilitas peralatan, sarana, dan prasarana
- e. Perlu adanya bangunan yang lebih layak, mengingat kantor BNNP saat ini sangat perlu direnovasi karena kurang layak dan sudah lama

#### **E. Program BNN Provinsi Riau**

Program kerja Badan Narkotika Propinsi Riau diatur berdasarkan bidang-bidang yang ada,yaitu :

1. Bidang Kelembagaan:
  - a. Melaksanakan pelantikan pengurus BNN
  - b. Melaksanakan rapat pengurus BNN
  - c. Melaksanakan rapat satuan tugas BNN
  - d. Melaksanakan Rapat kerja BNN dan BNK
  - e. Melaksanakan Koordinasi BNN dan BNK
  - f. Melaksanakan sosialisasi kelembagaan
  - g. Menyusun rancangan strategi BNN Provinsi Riau
2. Bidang Pencegahan (Preventif)
  - a. Peringatan hari anti narkoba internasional
  - b. Ceramah bahaya penyalahgunaan narkoba
  - c. Dialog kawula muda
  - d. Pelatihan penyuluhan narkoba
  - e. Pelatihan jaringan informasi narkoba
  - f. Pelatihan kepala sekolah dan guru



- g. Pencanaan sekolah bebas narkoba
  - h. Sosialisasi kelembagaan<sup>3</sup>
3. Bidang penegak hukum (refresif):
- a. Operasi Satgas narkoba
  - b. Test Urine (Polri, PNS, Mahasiswa/Pelajar, Masyarakat Umum)
  - c. Operasi satgas lapas
  - d. Operasi satgas POA
  - e. Operasi satgas Precursor
4. Bidang terapi dan rehabilitasi:<sup>4</sup>
- a. Memberikan penyuluhan narkoba kepada masyarakat yang berkunjung ke RSJ tampan tentang bahaya narkoba
  - b. Test urine setiap pasien yang dirawat inap
  - c. Konsultasi dan test Psikologi
  - d. Memberikan terapi kelompok kepada pasien/residen rawat inap setiap hari senin
  - e. Memberikan terapi kerja setiap hari selasa
  - f. Memberikan terapi religius setiap hari rabu
  - g. Memberikan terapi musik setiap kamis
  - h. Rekreasi pada hari minggu pertama tiap bulan
  - i. Memberikan terapi olahraga tiap sabtu sore
  - j. *Visite* dokter ahli setiap pagi

---

<sup>3</sup> Alfian Alimuddin, (Bagian Pencegahan), *wawancara*, Pekanbaru, 10 Oktober 2012

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG STRATEGI PENCEGAHAN**

### **NARKOBA**

#### **A. Pengertian Politik Dan Strategi**

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polistaia*, polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri(negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :<sup>1</sup>

a. Dalam arti kepentingan umum (*politics*).

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah. Politik(politics) artinya suatu rangkaian asas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan.

b. Dalam arti kebijaksanaan (*policy*).

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keadaan yang dikehendaki. Titik beratnya adalah proses pertimbangan, menjamin terlaksananya suatu usaha dan pencapaian cita-cita. Jadi politik

---

<sup>1</sup>Uchyana Oyong, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya, 2005), cet. ke 1, h. 46

adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.<sup>2</sup>

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang berarti *the art of the general* (seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan). Karl Von Clausewitz mengatakan bahwa Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik.<sup>3</sup>

Dalam masa modern dan globalisasi, pemakaian kata strategi sudah tidak terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam berperang, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk di dalam ilmu ekonomi ataupun olahraga. Sedangkan dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan untuk suatu tujuan.

Politik Nasional ialah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk menggapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.<sup>4</sup>

Strategi Nasional ialah cara melaksanakan politik nasional dalam menggapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi Nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, contohnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

## B. Narkoba dan Jenisnya

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Psikotropika adalah zat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>5</sup>

Narkoba adalah zat yg dibutuhkan oleh manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di bawah kendali ahli medis. Namun demikian dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.<sup>6</sup>

1. Candu adalah zat yang dihasilkan dari tanaman berbunga *papaver somniferum L.*, yang berisi bahan zat kimia aktif. Yang sebagian besar mengandung zat yang mempunyai daya kecanduan sangat besar, sehingga merugikan kesehatan.

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. ke 1, h. 45

<sup>6</sup>*Ibid.*

2. Heroin adalah zat yang dihasilkan oleh pohon candu, yang mempunyai daya adiktif sebesar 30 kali candu kasar, nama lain nya adalah putaw yang memberikan efek senang sesaat.
3. Depresan adalah zat yang menekan susunan syaraf pusat dengan akibat rasa tenang dan mengantuk.
4. Stimulan adalah zat yang abila digunakan menimbulkan stimulus atau rangsangan yang bersifat bersemangat, gembira berkhayal tinggi, percaya tinggi besar dan mempunyai energi tidak terbatas. Contoh nya seperti shabu-shabu dan ekstasi.
5. Pil ekstasi adalah berbentuk tablet dengan berbagai warna,bentuk,nama dan logo. Pil ini mengakibatkan hati menjadi gembira berlebihan,keinginan bergerak dalam musik dan lain-lain.
6. Inhalan adalah zat yang mudah menguap seperti campuran cat, lem, dan sejenisnya.Penyalahgunaan *inhalan* adalah dengan cara menghirup uap-uap dari zat-zat tersebut.

Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak

langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya. Kita harus memerangi kesia-siaan yang di akibatkan oleh narkoba. Usia remaja adalah usia dimana anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua. Sebab di usia seperti itu anak berusaha mencari identitas diri. Jiwa remaja penuh gejolak dan pemberontakan.

Gejolak ingin mendapatkan pengakuan atas keberadaannya, ingin mendapatkan kepercayaan, ingin mendapatkan penghargaan, ingin berprestasi, ingin menunjukkan keberanian, dan ingin mendapatkan kebebasan dan kemandirian. Kecenderungan anak melakukan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tua. Sekalipun lingkungan seperti keluarga, sekolah dan teman sebaya, mempunyai pengaruh yang besar bagi anak, tetapi apabila orang tua dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, maka pengaruh lingkungan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>7</sup>

Di masa modern sekarang ini peredaran narkoba sudah tidak bisa ditolerir, tidak memandang lingkungan dan usia. Banyak anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dalam proses peralihan menuju kedewasaan, terserang atau tergoda oleh narkoba. Walaupun telah diadakan penyuluhan-penyuluhan beberapa kali di sekolah-sekolah tapi narkoba tetap merasuki pikiran para pelajar yang masa depannya masih dipertanyakan. Masa depan yang seharusnya menjadi tujuan atau akhir dari perjuangan para pelajar dimasa-masa sekolah kini dipertanyakan statusnya. Jika narkoba terus

---

<sup>7</sup> Lukitaningsih, *Narkoba Penanganan dan Pencegahannya*, (Semarang: Rotary Club Semarang Sentral, 2000), cet. ke 1, h. 87

berkembang dan menggoda para pelajar agar mengalihkan pandangannya pada narkoba maka para pelajar yang akan menjadi penerus bangsa akan kandas di tengah jalan.

Sekolah merupakan tempat yang tepat bagi para pelajar untuk melakukan berbagai kegiatan yang positif, mengembangkan bakat dan minatnya agar tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, tentunya pelajar jauh lebih lama berada di keluarganya dibandingkan dengan berada di sekolah. Oleh sebab itu, orang tua jauh lebih berperan untuk menjaga, dan mengawasi anaknya agar tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Generasi muda saat ini perlu memiliki kesadaran akan pentingnya manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya, serta kesadaran akan pentingnya pengembangan potensi setiap individu untuk membentuk Indonesia yang bermartabat, maju, dan bebas dari narkoba. Berikut adalah penyebab Penyalahgunaan Narkoba:<sup>8</sup>

a. Kegagalan yang di alami dalam kehidupan

Tidak memiliki rasa percaya diri ataupun kurang mendapat kasih sayang orang tua dapat menyebabkan timbulkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Misalnya saja, orang tua yang terbilang sukses dalam berkarir tetapi kurang memberi perhatian kepada keluarga, adanya perselisihan di keluarga hingga mengalami kehancuran (Broken Home).

---

<sup>8</sup>Sudarsono , *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), cet. ke 1, h. 54

b. Pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat.

Menurut teori Waddington, mengenai “*develope mental land scape*”, jika seorang anak di tempatkan pada suatu lingkungan tertentu, maka sulitlah bagi kalangan tersebut untuk mengubah pengaruhnya, terlebih lagi jika lingkungan itu sangat kuat mempengaruhi anak tersebut. Dengan demikian untuk mencegah penggunaan narkoba, maka *land scape* (lingkungan) yang baik saat ini adalah lingkungan Islam. Sebagai orang tua seharusnya dapat memperingatkan anaknya agar tidak bergaul dengan teman yang berakhlak tidak baik.<sup>9</sup>

c. Kurangnya siraman agama

Untuk memerangi narkoba, upaya yang perlu di lakukan adalah membangkitkan kesadaran beragama dan menginformasikan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada para remaja. Karena, pada zaman sekarang ini sangt sedikit para remaja yang sadar akan pentingnya siraman agama.

d. Keinginan untuk sekadar mencoba

Keyakinan bahwa bila mencoba sekali takkan ketagihan adalah salah satu penyebab penggunaan narkoba, karena sekali memakai narkoba maka mengalami ketagihan dan sulit untuk di hentikan. Maka dari itu, bila seseorang ingin terhindar dari narkoba, harus dapat menjauhkan dirinya dari hal-hal yang memungkinkan untuk mencoba dan bersentuhan dengan narkoba.

---

<sup>9</sup>*Ibid* .



### C. Dasar Hukum Narkoba

Dasar hukum yang mengatur tentang narkoba menurut hukum pidana Nasional, penyalahgunaan narkoba yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 dibentuk bukan saja untuk menggantikan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika Nomor 7 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Titik berat peraturan baru mengenai narkoba ditujukan pada pencegahan akibat penyalahgunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, membahayakan kehidupan Negara dan membahayakan ketahanan nasional bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Sedangkan ketentuan pidana yang ada didalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika diatur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 85, sanksi hukumnya di kategorikan menjadi tiga bagian.

#### a. Sanksi Pidana Mati

Sanksi ini diatur dalam pasal 80 ayat (1), diancam dengan pidana mati bagi orang yang memproduksi, mengolah, mengekstaksi, mengonversi, merakit, atau menyediakan narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum,dan dalam pasal 82 ayat (1), yaitu diancam dengan pidana mati bagi orang yang mengexpor, mengimpor, menawarkan

---

<sup>10</sup>Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta:Bina Aksara, T.Th.),cet.ke 1, h. 17-18

untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba golongan I, dan pasal 82 ayat (3), yaitu bila tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi, serta pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu diancam dengan pidana mati bagi orang yang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilakukan secara terorganisasi.

b. Sanksi Pidana Denda

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 pasal 78 tentang Narkoba disebutkan bahwa:<sup>11</sup>

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
- b. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba Pasal 78

paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah )

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga)tahun dan paling lama 15(lima belas ) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan korporasi, di pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).

#### c. Sanksi Pidana Penjara

Sanksi pidana penjara minimal 1 tahun di atur dalam pasal 85 ayat (3) dan sanksi pidana maksimum seumur hidup yang diatur di dalam pasal 82 ayat (3)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja,

dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

#### **D. Strategi Pencehahan Narkoba Menurut Politik Islam**

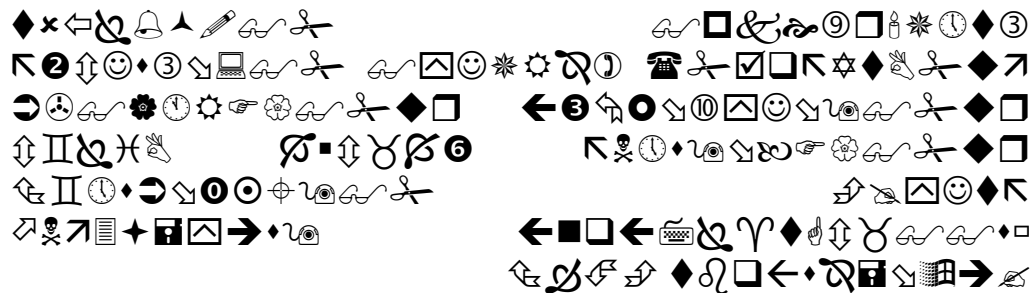
Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (*khamar* dalam bahasa arab), hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol.<sup>12</sup>

Minuman keras (*khamar*) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok *khamar* adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan *khamar* yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai *khamar* didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada *khamar* hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

---

<sup>12</sup> Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, (Bandung: Nuansa, 2004), cet. ke 1, h. 85

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (*khamar*) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam QS al-Maidah ayat 90:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>13</sup>

Menurut Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *alQur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004), cet. ke 2, h. 123

larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaaan terhadap agama.<sup>14</sup>

Menurut Quraish Shihab mengemukakan mengenai makna khamar dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya.

Menurut Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamar dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara factual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama madhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Ini berdasarkan sabda Rasul Saw. :

Artinya : “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”.(HR Al-Nasa’i).<sup>15</sup>

Alasan dan argumentasi mereka karena narkoba dapat merusak kesehatan, organ tubuh, saluran pencernaan, gangguan pencernaan, gangguan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad, *Shahih Sunnan an-Nasa’i*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004 ), Jilid 3, h. 324

jiwa, tertular virus HIV, dapat menghancurkan potensial sosial, merusak keamanan, menimbulkan perbuatan dan kriminalitas, kecelakaan lalu lintas dan dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan moralitas bangsa.

Ada pernyataan bahwa minuman beralkohol memberikan manfaat. Lantas mengapa dilarang dalam Islam, padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwa minuman tersebut memberikan manfaat?.<sup>16</sup>

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 219.<sup>17</sup>



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”<sup>18</sup>

Tafsir dari surat al Baqarah ayat 219 kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum khamar dan judi, di mana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam.

<sup>16</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke 1, h. 34

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *alQur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004), cet. ke 2, h. 34

Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total. Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamar atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.<sup>19</sup>

Definisi mengenai narkoba dalam *al Qur'an* tidak ada, karena memang *al Qur'an* itu bukan Kitab yang mengatur secara detail satu per satu. Tapi persoalan narkoba dapat didekati melalui pendekatan *qiyas*, yakni satu kasus yang tidak ada nashnya dalam *al Qur'an* dicarikan padanan kasusnya yang ada nashnya dalam *al Qur'an*.

Nabi Saw membenarkan pemakain *qiyas*, ketika ia bertanya kepada sahabat Mu'adz bin jabal.”Dengan apa engkau memutuskan suatu perkara?”jawabnya”dengan kitab Allah; kalau saya tidak dapati, maka dengan Sunnah Rasul, dan kalau saya tidak dapati, maka saya “berijtihad”dengan pikiran saya.Rasullullah membenarkan kata-kata Muadz yang mengenai ijtihad, sedangkan kata-kata ijtihad adalah mutlak yang tidak ditentukan untuk

---

<sup>19</sup>*Ibid.*



suatu lapangan hukum tertentu. Oleh karena itu, pemakaian *qiyas* dalam masalah jarimah dan hukumnya dapat dibenarkan.<sup>20</sup>

Ketika sahabat-sahabatnya bermusyawarah tentang hukuman had bagi peminum minuman keras, maka sahabat Ali R.A. berkata jika ia minum, maka mabuklah ia. Jika mabuk, maka ia mengigau, maka ia akan membuat-buat kebohongan. Oleh karena itu jatuhilah ia hukuman orang yang membuat-buat kebohongan (yakni orang yang menuduh orang lain berbuat zina sedangkan tuduhan itu tidak benar) hukuman minuman-minuman keras dengan membuat kebohongan. Terhadap pendapat sahabat Ali R.A, tidak ada sanggahan dari sahabat-sahabat lain.<sup>21</sup>

Pelaku penyalahgunaan narkoba baik pemakai, produsen, maupun pengedar dalam perspektif fikih jinayah adalah haram.<sup>22</sup> Begitu juga penyalahgunaan narkoba dalam persepektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Yang membedakannya adalah dalam fiqh jinayah yang melarang adalah Allah SWT dan Rasul-Nya (wahyu) dan mempunyai implikasi hukum di dunia dan akhirat, sedangkan dalam hukum pidana yang melarang adalah undang- undang produk manusia dan mempunyai implikasi hukum didunia saja, tidak diakhirat.

---

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1967), cet. ke2, h. 18

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Edisi 2, cet. ke3, h. 26

Menurut IbnTaimiyah bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah had, seperti halnya sanksi peminum khamar, karena ia menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi khamar, yaitu keduanya dapat merusak akal.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut DR.Ahmad Al-Hasari bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir, mereka berargumentasi bahwa tidak ada narkoba pada masa rasulullah, narkoba tidak ada dalam alquran maupun sunnah narkoba lebih berbahaya dari pada khamar dan narkoba banyak jenis dan macamnya.

Ada pendapat lain bahwa sanksi hukuman lain pada pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *Ta'zir* yaitu Khalifah Umar berdasarkan *ijma'* sahabat pernah menjatuhkan sanksi kepada peminum khamar 80 kali cambuk, padahal berdasarkan praktek rasullullah Saw sanksi tersebut 40 kali cambuk, sehingga dapat disimpulkan 40 kali cambuk merupakan *had* dan 40 kali lagi merupakan *Ta'zir*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

**BAB IV**

**TINJAUAN TERHADAP STRATEGI BNN PROVINSI RIAU DALAM  
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

**A. Strategi BNN Provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba  
dikalangan remaja**

Ketika penulis melakukan wawancara kepada kepala BNN Provinsi Riau Bapak Drs. Bambang Setiawan program yang sudah dilaksanakan oleh BNN provinsi Riau mereka menjawab dengan memberi data-data dibawah ini:<sup>1</sup>

**1. Pencegahan**

- a. Sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi masyarakat kota pekanbaru (pemutaran film menggunakan mobil penerangan infokom)
- b. Ceramah bahaya narkoba di Kuantan Hilir Kab.Kuansing
- c. Ceramah bahaya narkoba di Kab. INHU
- d. Ceramah dan sosialisasi bahaya narkoba di Kota Dumai
- e. Ceramah bahaya narkoba bagi masyarakat Tapung Kab.Kampar

**2. Penegakan Hukum<sup>2</sup>**

- a. Test urine bagi PNS Kab.Kuansing
- b. Test urine bagi pelajar Kec. Tapung Hulu
- c. Rapat koordinasi Satgas Prekursor BNN, BPOM, DISKES, Dir. Narkoba  
Riau di Pekanbaru

---

<sup>1</sup> Bambang Setiawan, Ketua BNN Riau, *wawancara*, Pekanbaru, 13 oktober 2012

- d. Test urine bagi pemkot Dumai
- e. Test urine bagi siswa SMA 1 Bangkinang

### 3. Terapi dan Rehabilitasi

- a. Mengikuti pertemuan FSG di Jakarta
- b. Mengikuti rakor T dan R di Bali
- c. Mengirimkan group band binaan (mantan pengguna narkoba) ke Jakarta

BNN sebagai lembaga yang di kedepankan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di indonesia khususnya di Riau, sebagaimana di tetapkan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan Perpres No.23 Tahun 2010 Tentang Kelembagaan BNN kini terus berkiprah mengembangkan kinerjanya.<sup>3</sup> Ancaman narkoba di indonesia semakin meningkat dan mengarah kepada generasi muda terdidik. Bahkan kini mulai merambah kepada keterlibatan aparat negara. Negeri ini kini bukan lagi sebagai wilayah transit, tetapi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkoba oleh jaringan sindikat internasional. Apabila penyalagunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman semakin mendekat.

Berkembangnya kasus kejahatan narkoba akan menjadi hambatan serius terhadap pembangunan peradaban bangsa. Menghadapi bahaya narkoba maka mutlak membutuhkan strategi yang efektif.

BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam

---

<sup>3</sup> Hamrianto, (Kasubag Administrasi), *wawancara*, Pekanbaru, 3 Desember 2012

rangka meminimalisasikan permasalahan Narkoba.<sup>4</sup> BNN telah memerankan sebagai subyek, melalui metode P4GN dengan sasaran pemberdayaan masyarakat. Memerlukan langkah strategis dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperanserta aktif.<sup>5</sup>

Sebelum menentukan langkah strategis dalam rangka pemberantasan Narkoba ilegal, perlu dilakukan analisis. Salah satu pendekatan analisis yang digunakan oleh BNNP Riau sebenarnya mengacu kepada BNN pusat<sup>6</sup>, pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*strength*, (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), and *treath* (ancaman).<sup>7</sup> yaitu mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Bidang Anggaran
- b. Bidang material
- c. Bidang metode
- d. Bidang pencegahan

Memberdayakan masyarakat dalam mengikis peredaran gelap narkoba melalui pendekatan hukum penawaran dan permintaan. Implementasinya melalui *suply reduction* and *demand reduction*. Data yang diungkap oleh BNN di atas mengindikasikan bahwa jumlah pengguna narkoba di Riau menjadi lahan subur bagi sindikat kejahatan narkotika. Tak

---

<sup>4</sup>Bambang Setiawan, Kepala BNNP Riau, *wawancara*, Pekanbaru, Pekanbaru, 3 Desember 2012

<sup>5</sup> Musa Firdaus, (Kabid Pemberdayaan Masyarakat), *wawancara*, Pekanbaru, 10 Oktober 2012

mengheran jika bisnis ini sangat menggiurkan bagi pelakunya. Dan bila dikaitkan dengan fenomena gunung es pengguna gelap narkoba maka yang tidak terdata atau di bawah permukaan terdapat 10 kali lipat nya.

1. *Supply reduction* (pemberantasan jaringan). Pemberantasan narkoba melalui pengurangan suplai (*supply reduction*). Dalam hal ini, upaya pengurangan permintaan adalah melalui program pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Sedangkan upaya pengurangan suplai adalah melalui program pemberdayaan masyarakat agar meninggalkan usaha di bidang narkoba, serta program pemberantasan penyeludupan dan perdagangan narkoba.<sup>8</sup>

Menarik untuk diketahui, ternyata tidak relevan adanya surat keterangan bebas narkoba. Sebab menurut pejabat laboratorium BNN yang saya wawancara menyatakan bahwa tes narkoba hanya berlaku temporer dalam jangka waktu pendek. Kandungan narkoba dalam urin dan darah hanya tersisa selama kurang dari seminggu setelah memakai, sedangkan di rambut tersisa sekitar 4 bulan. Oleh karena itu, apabila tes narkoba dilakukan dari sampel darah atau urin maka sampel tidak terdeteksi narkoba apabila sempat jeda memakai narkoba selama 1 minggu, jika sampel dari rambut maka pemakai tidak akan terdeteksi jika terakhir memakai narkoba 4 bulan lalu. Memang mustahil seorang pecandu tidak memakai narkoba dalam waktu berbulan bulan, sehingga

---

<sup>8</sup> Musa Firdaus, (Kabid Pemberdayaan Masyarakat), *wawancara*, Pekanbaru, 10 Oktober 2012

sampel yang paling baik untuk mendeteksi pecandu narkoba adalah menggunakan rambutnya.<sup>9</sup>

Kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Badan Narkotika Nasional difokuskan pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja dan di berbagai tempat kerja. Dikarenakan lingkungan kerja yang lebih kondusif akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik menyangkut kompetensi SDM, mentalitas, maupun produktivitasnya, yang akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan bangsa. Kerjasama ini termasuk dalam upaya menyiapkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, sebab TKI memiliki kerawanan menjadi objek maupun subjek perdagangan gelap narkoba. Menurut Menakertrans kerjasama dua pihak ini akhirnya menjadi langkah konkret yang efektif dalam rangka Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015.

2. *Demand reduction* (pengurangan permintaan). Dengan melakukan tindakan preventif melalui penyusunan pencanaan pembangunan. Membangun sumber daya pemerintah yang mempunyai *strategic vision* sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan

---

<sup>9</sup> Musa Firdaus, (Kabid Pemberdayaan Masyarakat), *wawancara*, Pekanbaru, 10 Oktober 2012

yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik, membangun transparansi dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan sehingga dapat diakses oleh setiap yang membutuhkan.

Ada potensi kerjasama antara pemerintah dan LSM. Dalam menentukan sasaran dan pencegahan:

- a) Menentukan luasan dan tingkatan permasalahan penyalahgunaan narkoba.
- b) Pengaturan sistem pengumpulan dan evaluasi data yang komprehesif.
- c) Pencegahan melalui pendidikan.
- d) Pencegahan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja. Dampak penyalahgunaan narkoba di tempat kerja adalah menurunnya produktivitas kerja, kehilangan pegawai yang baik, kecelakaan di tempat kerja, merugikan negara atau perusahaan maka perencanaan dan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan terkait dengan pekerjaan dan perlu dimasukan faktor pencegahan sebagai bagian penting.
- e. Bidang penanggulangan
  1. *Treatmen* dan rehabilitasi. Ini dilakukan untuk memberikan dukungan pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkoba.
  2. Penanguangan over dosis. Bisa dialami oleh pemakai yang sudah bertahun-tahun memakai narkoba. Salah satu faktor narkoba dilarang yakni tidak adanya sistem kontrol.



3. Mengatasi over dosis putaw. Biasanya yang terjadi untuk mengatasi si pecandu dalam kondisi over dosis, yaitu mengusahakan dalam keadaan yang tenang jika kita menemukan atau menghadapi masalah dengan orang yang over dosis.
4. Mengatasi over dosis stimulan. Bila menemukan atau berhadapan dengan orang yang mengalami hal ini, diusahakan dengan keadaan tenang menghadapinya jangan pernah memberikan atau memasukan air minum, karena itu akan jstru membuat kondisi lebih parah.
5. Rehabilitasi. Merupakan tahapan penting bagi pencandu narkoba untuk lepas dari ketergantungan narkoba. Pemulihan merupakan proses panjang dan sering diibaratkan perjalanan dari pikiran ke hati.

f. Bidang pembinaan SDM

SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang P4GN sangat berpengaruh dalam pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan mengemban visi BNNP Riau bebas dari narkoba.

g. Bidang pembinaan sumber daya dana<sup>10</sup>

Pengalaman empirik dari berbagai belahan dunia manapun, pemberantasan narkoba membutuhkan sumber dana yang sangat besar baik dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap narkoba, maupun untuk penanggulangannya melalui terapi dan rehabilitasi. Demi

---

<sup>10</sup> Musa Firdaus, (Kabid Pemberdayaan Masyarakat), *wawancara*, Pekanbaru, 10 Oktober 2012

tercapainya *outcome*, maka pendekatan kinerja berbasis anggaran menjadi orientasi.

#### h. Bidang saran dan prasarana

Salah satu dukungan yang penting selain SDM, dana, dan metode adalah sarana dan prasarana. Pembongkaran berbagai kasus telah dibuktikan dengan dukungan berbagai aspek, kecanggihan peralatan yang mampu mengendus berbagai transaksi peredaran gelap narkoba.

BNNP Riau juga melakukan kaderisasi sukarelawan masyarakat guna di jadikan sasaran sebagai *people power againt drugs* dalam pemberantas narkoba.<sup>11</sup> Di butuhkan komponen bangsa yang berkomitmen kuat dan konsisten. sejalan dengan visi Indonesia yakni tahun 2015 bebas dari narkoba, visi yang menjadi pijakan bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa ASEAN untuk memberantas narkoba. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan berarti tidak ada kasus sama sekali. Karena bagaimanapun ancaman pasar global sangat mungkin sewaktu -waktu menembus dunia dengan peredaran gelap Narkoba.

Penggalangan masyarakat agar berperanserta aktif dilakukan guna mendukung Indonesia untuk bersih dari peredaran gelap narkoba. Menyimak kebijakan pemerintah di atas, sangat relevan dengan visi pembangunan bangsa Indonesia yaitu tewujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi,

---

<sup>11</sup> Bambang Setiawan, Ketua BNNP Riau, *wawancara*, Pekanbaru, 13 Oktober 2012

bersatu, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Berbagai langkah praktis yang mendukung strategi di maksud adalah:

Pertama, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, memiliki perilaku terpuji dan mampu memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.

Kedua, pencegahan, kegiatan ini sangat terkait dengan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka di perlukan upaya *preventive-educative* dan melibatkan berbagai institusi terkait, baik pemerintah, masyarakat, kampus/sekolah maupun keluarga.

Ketiga, sosialisasi, dilakukan secara terprogram dan konsisten guna membangun *image* masyarakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah namun merupakan masalah yang harus di tanggulangi bersama, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Keempat, melakukan koordinasi secara profesional oleh seluruh institusi terkait dengan mekanisme yang efektif.

Kelima, meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam kurun waktu selama hampir delapan tahun BNN berkiprah, telah mengindikasikan bahwa tanpa peran serta aktif masyarakat pendekatan P4GN kurang efektif. Sudah saatnya meningkatkan peranserta masyarakat guna berperan sebagai subyek bukan lagi obyek.

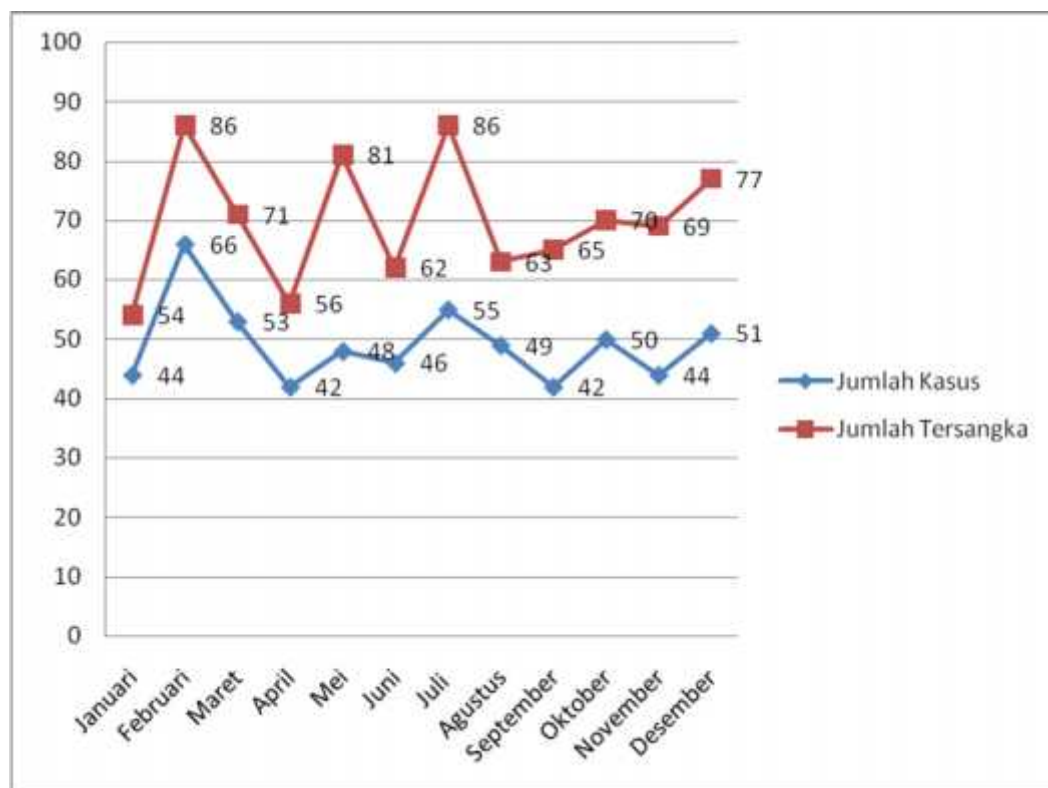
Keenam, pembangunan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi. Berbagai hal terkait dengan pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap

narkoba perlu di komunikasikan dan diinformasikan dengan cara-cara yang edukatif, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pendampingan.

Ketujuh, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan ini mencakup pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal secara ketat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh sindikat narkoba.

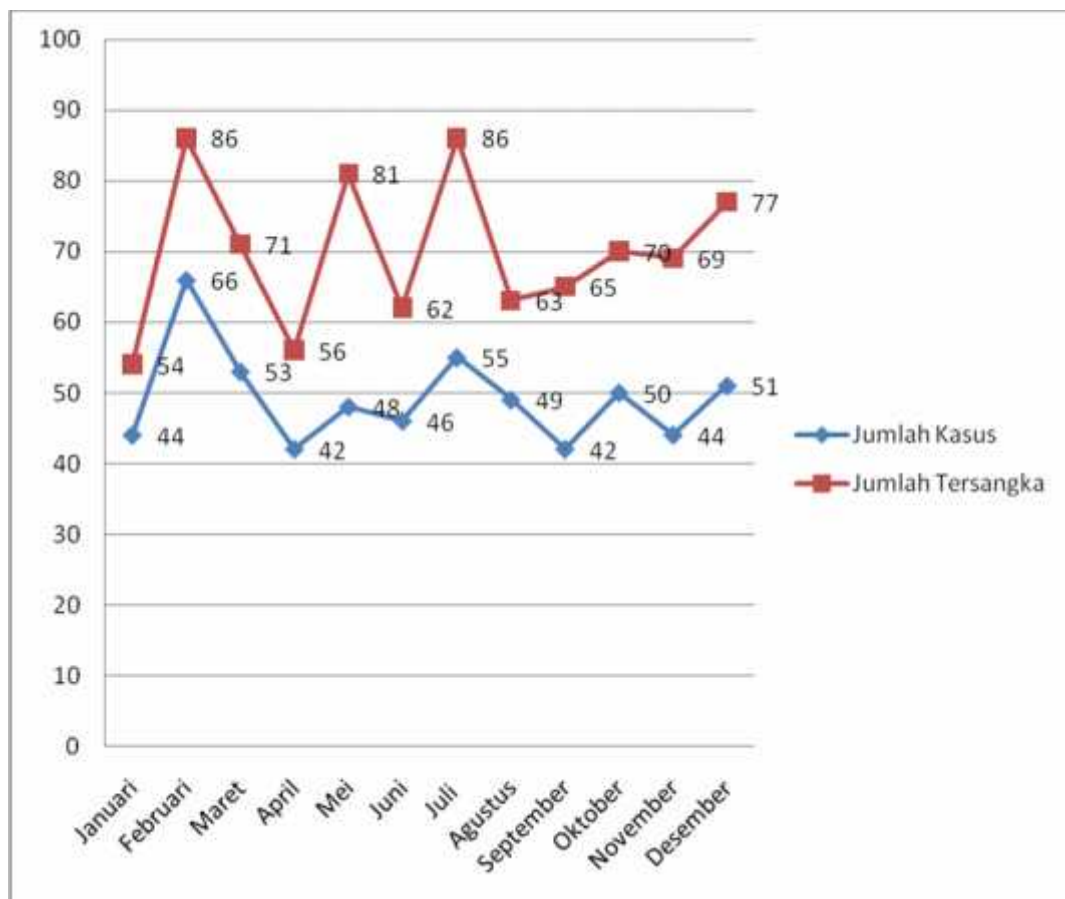
Menurut data yang penulis peroleh dari kantor BNNP riau pada wawancara dengan Drs. Bambang Setiawan bahwa jumlah kasus Narkoba yang terungkap dari tahun 2010 sampai 2011 cenderung mengalami peningkatan, hal ini bisa di lihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1. Jumlah Kasus Narkoba Yang Terungkap Tahun 2010 di Provinsi Riau**



Sumber : Data Survey BNN Provinsi Riau tahun 2010

**Tabel 4.2 Jumlah Kasus Narkoba Yang Terungkap Tahun 2011 di Provinsi Riau**



Sumber : Data Survey BNN Provinsi Riau tahun 2011

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba pada dua tahun terakhir semakin meningkat pada tahun 2010 tercatat sebanyak 523 kasus dan jumlah tersangka 728 dan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 590 kasus dan jumlah tersangka 840.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Bambang Setiawan, ketua BNN, wawancara, Pekanbaru, 13 Oktober 2012

Sesuai hasil dari kasus-kasus yang diungkapkan Polri dan Satgas BNN, sindikat/organisasi kriminal yang terlibat dalam kejahatan narkoba adalah sebagai-berikut:

1. Sindikat ganja - terdiri atas jaringan orang-orang Indonesia.
2. Sindikat heroin (Putaw) - terdiri atas jaringan orang-orang Nigeria dan Afrika lainnya.
3. Sindikat kokain - terdiri atas jaringan orang-orang Nigeria dan Afrika lainnya.
4. Sindikat ekstasi dan Shabu - terdiri atas jaringan orang-orang Cina Asing dan Cina Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia:

- a. Faktor geografi: provinsi Riau adalah provinsi yang sangat strategis, sehingga sangat rentan dan mudah terjadinya penyelundupan bagi sindikat kejahatan narkoba.
- b. Faktor demografi: jumlah penduduk Riau yang demikian besar yaitu 1,2 juta jiwa (30%-nya generasi muda) dan majemuk, menjadikan tempat pemasaran yang sangat menjanjikan.
- c. Faktor ekonomi: sampai saat ini kondisi ekonomi Riau masih lemah/belum stabil permasalahan hidup semakin rumit menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu pelarian, bisnis jalan pintas untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

- d. Faktor sosial & pendidikan: SDM rendah, rendahnya moralitas terhadap agama, keluarga yang tidak harmonis serta lingkungan yang tidak mendukung ke arah yang lebih baik. Hal ini menyebabkan dampak sosial dan pendidikan yang sangat besar dan menjadi pengaruh buruk terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dan dunia pendidikan.
- e. Faktor penegakan hukum: pemberian sanksi tidak maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera, kualitas sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum yang rendah, sarana dan prasarana yang masih terbatas bahkan kurang memadai serta budaya hukum masyarakat (kurang sadar hukum).
- f. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi: kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi berkembang sangat pesat berakibat memudahkan terjadinya transaksi narkoba.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Politik Islam Terhadap Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau**

Salah satu pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqh terhadap strategi BNN Provinsi Riau dalam mengatasi masalah narkoba di Riau.

Penelitian terhadap strategi BNNP dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini cukup mempunyai arti penting dalam upaya mengatasi dan menanggulangi narkoba dikalangan remaja. Mengetahui dan

---

<sup>13</sup> Bambang Setiawan, ketua BNN, *wawancara*, Pekanbaru, 13 Oktober 2012

memahami strategi tersebut, ikut menentukan metode yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sehingga usaha dan upaya penanggulangan narkoba akan dapat berhasil dengan baik. Dengan mengetahui strategi BNNP dalam menindak kasus narkoba, BNNP dapat pula mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Riau. Maka dari itu profesionalisme dan kebijakan harus ditegakkan bagi anggota BNNP Riau sebagaimana dalam sebuah kaidah yang menyatakan:

**نصرف الامام على الرعية منوطاً بالمصلحة**

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan”

Setiap kebijakan yang mashlahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi<sup>14</sup>

Definisi mengenai narkoba dalam Alqur'an tidak ada, karena memang Alqur'an itu bukan Kitab yang mengatur secara detail satu per satu. Tapi persoalan narkoba dapat didekati melalui pendekatan *qiyas*, yakni satu kasus yang tidak ada nashnya dalam Alqur'an dicarikan padanan kasusnya yang ada nashnya dalam Alqur'an. Hal itu dilakukan dengan melihat *'illat* (motivasi hukum) yang sama, yakni sama-sama membahayakan. Narkoba bisa

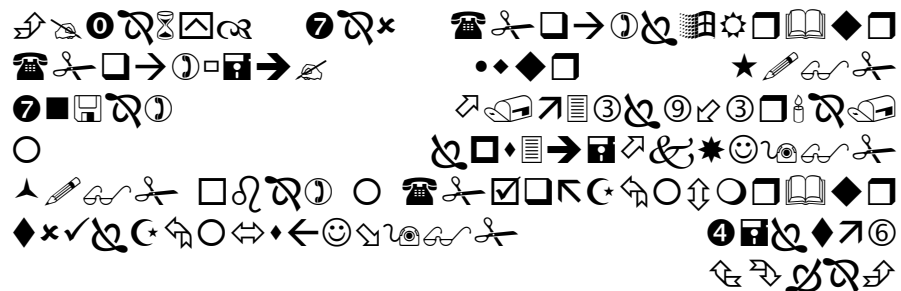
---

<sup>14</sup> Ahmad Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), ed, 1, cet. ke 2, h .148



digolongkan dalam khamar, namun dampak negatif narkoba lebih daripada khamar.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195:



Artinya : “Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.<sup>15</sup>

Islam memberikan solusi terhadap penyalahgunaan narkoba secara sangat luas dan komprehensif. Baik hukum penyalahgunaan, narkoba untuk pengobatan, serta ketetapan pidana yang berkait dengan narkoba. Baik produsen narkoba, distributor/penyalur, pemakai, kurir, penjual, pemesan, pembayaran maupun pemakai hasil penjualan.

Islam mengatur hal ini secara tegas. Pemakai narkoba dicambuk 40-80 kali cambukan. Kalau sudah empat kali kasus, maka yang empat kalinya ia dihukum mati (hukum bunuh). Kalau pemakai saja hukumnya tegas dan berat seperti itu, apalagi produsen. Hukumnya adalah hukuman mati.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media 2004), h. 30

<sup>16</sup> Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, (Bandung: Nuansa, 2004), cet. ke 1, h. 102

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba BNNP melakukan upaya-upaya yaitu upaya preventif dan upaya refresif:

#### 1. Upaya preventif

Preventif atau pencegahan ialah usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat pada umumnya sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan.

BNNP Riau telah melakukan upaya-upaya preventif yaitu:

- a. Peringatan hari anti narkoba internasional
- b. Ceramah bahaya penyalahgunaan narkoba
- c. Diaog kawula muda
- d. Pelatihan penyuluhan narkoba

Selain upaya-upaya preventif, BNNP Riau juga melakukan upaya refresif yaitu:<sup>17</sup>

#### a. Operasi satgas narkotika

Aparat kepolisian bersama anggota BNNP melakukan penyelidikan. Walaupun masih banyak perkara atau kasus yang tidak terselesaikan dikarenakan adanya penghambat. Tetapi aparat kepolisian dan BNNP di polsek tetap berusaha untuk mengusut perkara dan kasus yang terjadi di Riau sampai tuntas. Sebagaimana dalam sebuah kaidah yang menyatakan :

Kaidah di atas menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka jangan

---

<sup>17</sup> Musa Firdaus, (Kabid Pemberdayaan Masyarakat), *wawancara*, Pekanbaru, 10 Oktober 2012

ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

b. Membentuk kerjasama dengan masyarakat luas

Bekerjasama dengan masyarakat dalam dalam menanggulangi narkoba ini akan mempermudah aparat BNNP menindaklanjuti penyalahgunaan narkoba. Hal ini mencerminkan sikap tolong menolong, BNNP menolong masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dari bebas narkoba, sedangkan masyarakat membantu aparat BNNP dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi narkoba. Islam juga telah menganjurkan agar umatnya saling tolong menolong.

Sebagaimana dalam surah al- Maidah (5):2 sebagai berikut:



Artinya : “Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>18</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan agar kita saling tolong menolong dalam kebajikan dan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004), cet. ke 1, h. 106

Membantu BNNP dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang baik karena untuk kemashlahatan umat manusia.

Banyak langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang ditawarkan oleh Islam yaitu melalui bimbingan agama atau dakwah, terutama oleh pihak-pihak yang terkait dengan persoalan narkoba. Dalam konsep Islam lebih bersifat sinergi keserasian jasmani dan rohani. Kalau jiwa sehat, tubuh sehat. Dalam masalah narkoba lebih kepada konsep pencegahan daripada sanksi. Memang sanksi hukum Islam itu berat, tapi sebenarnya Islam lebih kepada pencegahan.

Ada konsep pengobatan Islam terhadap pecandu narkoba, sebagai studi kasus penulis mengambil contoh yang menyebutkan ada tiga contoh terapi terhadap pecandu narkoba, berdasarkan nilai-nilai Islam, yang dikembangkan di Indonesia. Pertama, pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, mengembangkan terapi Inabah, yang meliputi empat cara, yakni bersuci (mandi/berwudlu) talqin (dzikir), ibadah dan do'a, serta disiplin ternyata 93% dari sekitar 5.845 pasien yang berobat disana bisa disembuhkan dan tidak kembali kepada narkoba lagi. Kedua, metode Prof. Dadang Hawari yang disebut terapi detoksifikasi, meliputi terapi medis, psikiatri, dan agama<sup>19</sup>. Prinsipnya adalah berobat dan bertobat. Ketiga, metode taubatan nasuha yang meliputi ilahiah, medis, psikologis dan metapsikologis. Metode metapsikologis maksudnya adalah dalam diri kita ada dua macam energi

---

<sup>19</sup>Trans tv, *Reportase Khusus*, 21 Januari 2013

yakni energi positif dan negatif. Kalau energi positif itu diolah dengan baik, maka energi negatif bisa dikendalikan. Orang yang kecanduan narkoba itu pada hakekatnya bukan jasmaninya yang sakit, tapi rohaninya karena itu, rohaninya itu pun harus disembuhkan terlebih dahulu.

Maka dari itu bahwasanya narkoba itu mengandung zat yang berbahaya dan kemudharatan pada siapapun bagi yang memakainya ataupun bagi lingkungannya. Dalam Islam sesuatu yang membawa mudharat harus dihilangkan sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqh:

لَضَرَرِيْنَ زَالٍ

Artinya : “kemudharatan harus dihilangkan”<sup>20</sup>

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sudah melaksanakan tugas yang sesuai dengan perannya dan tidak meninggalkan konsep-konsep yang telah diterangkan dalam politik Islam, walaupun pencegahan yang dilakukan oleh BNNP belum sepenuhnya bisa di atasi, namun kaidah fiqh telah menjelaskan :

مَا لَا يَدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَتْرَاكُ كُلَّهُ

Artinya : “Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), ed, 1, cet. ke 2, h. 148

<sup>21</sup> *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Riau dalam berbagai bidang, tetapi yang menjadi strategi oleh BNNP Riau adalah *pertama, Supply reduction* (pemberantasan jaringan). Mengenai supply reduction perlu dicermati tentang adanya tiga hal yang menyebabkan orang menggunakan narkoba yaitu keinginan orang itu sendiri, pengaruh lingkungan, dan ketersediaan narkoba.

*Kedua, Demand reduction* (pengurangan permintaan). Dengan melakukan tindakan preventif melalui penyusunan perencanaan pembangunan.

2. Tinjauan politik islam tentang stratgi BNN Provinsi Riau ini adalah upaya dan strategi BNNP memang belum maksimal, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sudah melaksanakan tugas yang sesuai dengan perannya dan tidak meninggalkan konsep-konsep yang telah diterangkan dalam politik Islam, walaupun pencegahan yang dilakukan oleh BNNP belum sepenuhnya bisa di atasi, namun kaidah fiqh telah menjelaskan :

مَالَا يَدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَتْرَاكُ كُلَّهُ

“apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), ed, 1, cet. ke 2, h.148

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah lebih banyak memberikan dukungan kepada BNN Riau ini dalam pencegahan narkoba, khususnya pada kalangan remaja, mereka adalah harapan kita semua untuk penerus bangsa dimasa yang akan datang.
2. Kaum Remaja pada umumnya masi dalam tahap pendidikan, maka sangat diharapkan kepada kalangan pendidik untuk memperhatikan murid-muridnya, memperbanyak pelajaran agama dan sebaik nya setiap sekolah membuat program yang bertujuan untuk melakukan pencegahan narkoba ini.
3. Kepada setiap keluarga diharapkan untuk memperhatikan tingkah laku anak-anaknya, berikan lah mereka pendidikan yang dapat menangkal mereka dari narkoba, salah satu diantara anggota keluarga teah menjadi korban narkoba, wajib bagi keluarga tersebut melaporkannya kepada pihak berwajib atau mengantarkan mereka ke pusat-pusat terapi dan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul al- Fiqh*. Mesir: al-Haromain, 2004.
- Ahmad Djaluli, *Fiqih Jinayah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 2, cet. Ke-3, 2000.
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, Ed, 1. cet, 2, 2007.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1967.
- Andi hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta : Sinar Grafika, cet 1, 1994.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, T.Th
- Bambang Setiawan, Kepala BNNP Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 3 Desember, 2012.
- BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia), *Pencegahan penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta Timur, 2007.
- Data dan dokumentasi BNNP
- Data Survey BNN Provinsi Riau tahun 2011.
- Dzjazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hakim Arif, *Bahaya narkoba alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*. Bandung: Nuansa, cet 1, 2004.
- Lukitaningsih, D. Y. *Narkoba Penanganan dan Pencegahannya*. (Semarang: Rotary Club Semarang Sentral, cet 1, 2000.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi* Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, , cet 1, 2008.
- Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.



Trans tv, *reportase khusus*, 21 Januari 2013

Uchyana Oyong, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya, cet  
1, 2005.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78